

**STRATEGI PENINGKATAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN**

TESIS



Diajukan oleh

INDRAWATI RETNO KUSWULANDARI

142202661

Kepada

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

Yogyakarta, September 2016

Indrawati Retno Kuswulandari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobill alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana di STIE Widya Wiwaha.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan ini dari awal sampai akhir sudah melibatkan banyak pihak, yang meluangkan perhatian baik secara materiil maupun moril. Untuk itu sudah selayaknya apabila pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Halim, M.BA, selaku pembimbing tesis 1 yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Mohammad M ahsun, SE, Ak, CA, CPA selaku pembimbing tesis 2 yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Para dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.

4. Para pengelola dan staff Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas bantuan yang telah diberikan, termasuk para pengelola perpustakaan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa STIE Widya Wiwaha Yogyakarta angkatan 14.2B atas kebersamaan selama ini.
7. Suamiku tercinta M Farid Fanani, SE, AK, M.Si serta anak-anakku tersayang M Firman Adinata, Raiyana Syafira dan Sarah Olifa Fuadia yang selalu memberi dukungan dan doa tiada henti.
8. Ayahanda Prof. Dr. dr. Santoso, Ms, Sp.Ok dan ibunda Sri Ismudiati beserta keluarga besar yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Ayahanda H. Ahmad Yohana beserta keluarga besar yang selalu mendorong kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini. Dengan segala kekurangan yang ada, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, September 2016

Indrawati Retno Kuswulandari

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perunusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah	11
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	13
C. Rasio Kemandirian Daerah	20
D. Strategi Peningkatan Kemandirian	23
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Desain Penelitian	26
B. Obyek Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Lokasi Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisa Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah	
1. Aspek Geografis	33
2. Aspek Demografi	39
3. Aspek Potensi Daerah	39
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
1. Visi	43
2. Misi	45
3. Tujuan dan Sasaran	47
C. Keuangan Daerah	48
D. Analisis dan Pembahasan	65
E. Hasil Wawancara	68
F. Pembahasan	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014.....7
Tabel 1.2	Skala Interval Kemandirian Daerah 8
Tabel 1.3	Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2014 9
Tabel 2.1	Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah..... 22
Tabel 3.1	IFAS dan EFAS 31
Tabel 4.1	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Klaten..... 35
Tabel 4.2	Kondisi Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 37
Tabel 4.3	Nama dan Jenis Obyek Wisata Serta Lokasi di Kabupaten Klaten 40
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011– 2014 50
Tabel 4.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014 51
Tabel 4.6	Realisasi Kontribusi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014..... 52
Tabel 4.7	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014 53
Tabel 4.8	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014 54
Tabel 4.9	Kontribusi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014 56

Tabel 4.10	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014	58
Tabel 4.11	Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014	66
Tabel 4.12	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014.....	67

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten	34

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

INTISARI

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi di pemerintah daerah kabupaten Klaten dengan kebijakan otonomi daerah merupakan langkah yang strategis dalam pembangunan. Adapun tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, sehingga dengan otonomi daerah diharapkan tingkat ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat dikurangi. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah kabupaten Klaten memiliki tingkat kemandirian daerah yang masih sangat kurang. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Klaten masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Dengan melihat kondisi tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul “Strategi Peningkatan Kemandirian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah kabupaten Klaten.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten. Metode analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan data yang di gunakan menggunakan data primer dengan teknik wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2011 – 2014.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pemerintah daerah kabupaten Klaten selama 4 tahun dari tahun 2011 – 2014, memiliki tingkat kemandirian yang sangat kurang. Sehingga untuk meningkatkan kemandirian daerah diperlukan strategi untuk mengoptimalkan semua sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki, sehingga pendapatan yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tingkat kemandirian daerah dapat di tingkatkan.

Kata Kunci : Kemandirian keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi mempunyai makna kemandirian tetapi bukan kemerdekaan (Syafudin,1991:23). Dengan demikian dapat diartikan otonomi merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada daerah otonom untuk melakukan kebebasan membuat dan menentukan kebijakan sendiri untuk mengurus dan menjalankan kepentingan-kepentingan umum dengan prinsip nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Agar otonomi dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan maka pada tanggal 1 Januari 2001 diberlakukan penerapan otonomi daerah yang memberikan implikasi pada pelimpahan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah (Zulkifli & Haris Gunanto, 2012:210).

Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalankan suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana dijelaskan mengenai kewenangan daerah, kewajiban kepala daerah dan hal yang terkait dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002:24), Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat membantu keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri dengan melibatkan partisipasi

aktif masyarakat. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi dalam Otonomi Daerah mempunyai maksud aparat pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang serta tanggung jawabnya (Halim,2001:307). Kebijakan yang terkait tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi efektif dan efisien (Halim,2001:308). Dengan seiring waktu Undang-Undang tersebut direvisi menjadi UU N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 berisikan tentang peraturan-peraturan sumber penerimaan daerah yang baru yaitu dana perimbangan dan dana pinjaman. Dengan diberlakukannya Undang – Undang ini diharapkan akan lebih dapat

memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk lebih dapat menggali dan mengolah potensi kekayaannya, sehingga akan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kemandirian daerah akan dapat terwujud.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berisikan tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan antar pusat dan daerah. Dengan berpedoman pada ke dua Undang-Undang tersebut, diharapkan otonomi daerah lebih mampu untuk berkembang dan lebih mandiri, sehingga tidak tergantung dengan pemerintah pusat khususnya pada segi pengelolaan keuangan.

Kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yang sangat luas, khususnya kabupaten atau kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan harkat dan martabat di daerah, memberikan peluang politik dalam rangka

meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah dan pada akhirnya tercipta suatu kemandirian. Dengan kemandirian daerah diharapkan pemerintah daerah lebih dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan efisiensi pelayanan masyarakat sehingga akan lebih dapat mengelola aset daerah dengan tepat dan akan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang sendirinya dan berkesinambungan. Otonomi daerah akan lebih memberi kemandirian yang lebih besar di dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat pengelolaan potensi daerah secara optimal.

Berlakunya otonomi daerah menjadi salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, yang telah membawa perubahan mendasar bagi demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut sangat memberi dampak yang cukup besar bagi pembangunan politik di Kabupaten Klaten yang kondusif dan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi.

Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan adalah dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar sumbangan PAD yang diberikan kepada APBD maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil, sehingga peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim,2014:169).

Pengukuran kinerja keuangan sangatlah penting, dikarenakan dengan pengukuran kinerja keuangan akan dapat menilai akuntabilitas pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Akuntabilitas keuangan menunjukkan kemampuan keuangan publik dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004 : 182)

Menilai keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan dalam Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai semua kegiatan pemerintah daerah secara komperatif dalam penyajiannya.

Dilihat dari kondisi Geografis, Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Tengah dan merupakan salah satu pemerintahan daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, Kabupaten Klaten terus melakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk terciptanya daerah mandiri. Kegiatan perekonomian daerah di Kabupaten Klaten semakin berkembang dan kondusif dengan adanya lembaga-lembaga penunjang seperti lembaga keuangan Bank dan Non Bank.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten merupakan susunan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten yang meliputi komponen penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga daerah serta PDRB (Produk Domestik Regional Brut) per kapita.

Penerimaan daerah di Kabupaten Klaten dilihat dari PAD antara lain: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, yang memberi sumbangan terbesar adalah dari hasil retribusi daerah sedangkan penerimaan dari sektor yang lain belumlah optimal. Melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat ini masih belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan untuk pengeluaran daerah.

Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah masih sangat rendah. Kondisi inilah yang menciptakan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun jauh dari harapan, masalah yang sering terjadi adalah adanya ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat yang mencerminkan masih kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam membiayai daerahnya sendiri (Halim,2007:207).

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten digambarkan pada alokasi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Berikut ini tingkat pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014 dipaparkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
 Tahun 2011 – 2014

TAHUN ANGGARAN	APBD	
	PAD (Rp)	SUBSIDI (Rp)
2011	72.290.993.849	920.807.670.268
2012	84.755.834.704	1.098.162.417.447
2013	115.441.420.053	1.174.619.195.741
2014	177.922.415.860	1.250.626.353.033

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah digunakan alat analisa sebagai berikut (Halim,2004:150)

Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan PSi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Bantuan PSi + Pinjaman

Sedangkan skala interval kemandirian keuangan daerah dipaparkan dalam tabel 1.2 dan besarnya rasio kemandirian daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 – 2014 dipaparkan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

PERSENTASE	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
0,00 % - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 % - 20,00 %	Kurang
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 % - 40,00 %	Cukup
40,01 % - 50,00 %	Baik
➤ 50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

Tabel. 1.3
 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
 Tahun 2011 – 2014

No	Tahun	APBD		
		PAD (Rp)	Subsidi (Rp)	Rasio Kemandirian
1.	2011	72.290.993.848	920.807.670.268	7,85 %
2.	2012	84.755.834.704	1.096.162.417.447	7,73 %
3.	2013	115.441.420.053	1.174.619.195.741	9,83 %
4.	2014	177.922.415.860	1.250.626.363.033	14,22 %

Sumber : Dinas DPPKAD Kabupaten Klaten (Diolah).

Dengan berpedoman data diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Klaten dari periode tahun 2011–2014 dengan berdasarkan kriteria Litbang Depdagri menunjukkan skala kemandirian yang masih sangat kurang hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat yang didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan Lain-lain yang diatur oleh Undang–Undang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten masih sangat kurang dalam membiayai belanja daerahnya sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan permasalahan diatas dapat dikemukakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten masih sangat kurang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menentukan strategi meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk menentukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Klaten di masa depan.

b. Manfaat untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai ruang belajar yang sangat membantu dalam kapasitas serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial. Dan dapat menjadi referensi dengan penelitian terkait khususnya di sektor publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan titik awal dimulainya otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas, dan potensi daerah, sehingga akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan potensi yang dimiliki semua daerahnya.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dimuat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antara daerah dengan daerah lain.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah daerah atau pihak lain, seperti: badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan otonomi daerah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legeslatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertakan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kepada yang menugaskan.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan daerah prinsip-prinsip yang dipakai selalu berpedoman pada Undang-Undang Keuangan Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan setiap keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dari pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Halim,2007:99). Pendapatan daerah sangatlah tergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pengelolaan keuangan yang baik sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang handal yang didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah yang dapat diketahui dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan bertolak dari tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/provinsi dalam pelaksanaan otonomi daerah,

menurut Widaya mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain:

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan biaya lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Biaya pungutan yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.

(Mappan Nasrun dan Alwi, Analisis Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).

Sedangkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber dengan potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan peraturan-peraturan daerah yang ada. Berdasarkan pada Pasal 6 Undang -Undang No. 33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 3 komponen yaitu :

1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Halim (2004:67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan Pendapatan Pajak Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Menurut Undang–Undang tersebut jenis pendapatan pajak untuk Kabupaten/Kota. Seiring dengan perkembangan waktu

Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan terbitnya Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

1.2 Pendapatan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Sedangkan menurut Halim (2004:67) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Pendapatan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000 untuk jenis Pendapatan Retribusi Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakatas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut

tergolong *quasygoods* dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan pelayanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan pada masyarakat.

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah .

Sedangkan obyek pendapatan menurut Undang-Undang No.34

Tahun 2000 tersebut terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian biaya Cetak KTP.
- 4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil.
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman.
- 6) Retribusi Penguburan Mayat
- 7) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 8) Retribusi Pelayanan Pasar.

- 9) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 10) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemedam Kebakaran.
- 11) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 12) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 13) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 14) Restribusi Jasa Usaha Pasar Grasir atau Pertokoan.
- 15) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan.
- 16) Retribusi Jasa Usaha Terminal.
- 17) Retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.
- 18) Retribusi Jasa Tempat Usaha Penginapan.
- 19) Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus.
- 20) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.
- 21) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 22) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 23) Retribusi Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 24) Retribusi Izin Usaha Mendirikan Bangunan.
- 25) Retribusi Izin Trayek.

1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusaan milik daerah dan pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis Pendapatan ini meliputi obyek pendapatan antara lain:

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.
- c. Bagian Lembaga Keuangan Non Bank.
- d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi.

(Halim,2004:68)

1.4 Lain – lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari lain- lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil penjualan aset yang dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Penerimaan bunga deposito
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerja.
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP – TGR) (Halim,2004:69).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah . Dana perimbangan untuk Kabupaten/Kota . Jenis pendapatan daerah meliputi:

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang meliputi:

- a. Bagi Hasil Pajak
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

2.2 Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK), yang meliputi:

a. Dana Alokasi Khusus Reboisasi.

b. Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi.

2.4 Bagi hasil pajak dan keuangan dari Kabupaten/Kota.

3. Lain – lain pendapatan yang sah

Lain – lain pendapatan yang sah terdiri dari dana hibah/dana bantuan dari pemerintah di peruntukkan untuk korban bencana alam, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari daerah lain (Halim,2004:69).

C. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah yang berupa barang dan kewajiban merupakan salah satu konsekwensi pemerintah daerah di dalam menjalankan fungsi pemerintah. Di dalam pelaksanaan pemerintah daerah harus berpedoman pada Undang–Undang yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah menggunakan rasio kemandirian.

Rasio Kemandirian yang dipakai untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan melihat penerimaan keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dan dipungut oleh

daerah itu sendiri (Halim,2002:312). Dengan kata lain rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada semua masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut: (Halim,2004:150).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Psi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Dengan berdasarkan rumus diatas, maka hasil perhitungan rasio kemandirian dapat menggambarkan sejauh mana tingkat ketegantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (dari pemerintah pusat dan provinsi), sehingga dengan berlakunya otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan apabila dilihat dari skala interval keuangan daerah dipaparkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

PERSENTASE	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
0,00 % – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 % – 20,00 %	Kurang
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 % - 40,00 %	Cukup
40,01 % - 50,00 %	Baik
➤ 50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

Kemandirian keuangan daerah dapat digunakan untuk memberi gambaran terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana semua itu merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan kata lain strategi peningkatan pendapatan daerah sangatlah penting, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tinggi.

Semakin tinggi angka rasio kemandirian dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (dari pemerintah pusat dan propinsi) akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin

rendah angka rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal akan semakin tinggi. Rasio kemandirian selain itu juga dapat digunakan untuk memberi gambaran terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana semua itu merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan kata lain strategi peningkatan pendapatan daerah sangatlah penting, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tinggi.

D. Strategi Peningkatan Kemandirian

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, menurut Chandler Strategi adalah tujuan panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan (Rangkuti,2015:4). Untuk itu elemen–elemen yang mendukung haruslah selalu ditingkatkan dengan selalu berfokus pada proses penetapan tujuan, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan perencanan. Dalam hal ini salah satu strategi yang digunakan salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan meningkatkan strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Namun masalah–masalah yang

masih dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya finansial meliputi:

1. Masih tingginya tingkat kebutuhan daerah, sementara penerimaan daerah tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan, sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui *charging for servis* direspon secara negatif. Keadaan tersebut dapat memberikan dampak ke masyarakat yang enggan membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Rendahnya sarana dan prasarana seperti: jalan, pasar, terminal dsb, sehingga dapat memberi dampak kelesuan ekonomi daerah.
4. DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencakupi
5. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati potensi riil.

Peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dibutuhkan langkah-langkah yang strategis, antara lain:

1. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungut pajak pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan mempermudah dan mempercepat dalam proses transaksi.

5. Meningkatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan sosialisasi pendapatan daerah ke semua pihak.

(Armada, Strategi Peningkatan PAD)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Kuncoro (2003:23), penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek peneliti. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengimplementasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian yang non eksperimen, hal ini dikarenakan pada penelitian ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.

Analisis kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kualitas. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2015:1).

Pendekatan ini berdasarkan dari hasil data yang telah diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan yang berupa analisis rasio kemandirian.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.

C. Sumber Data

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten. Penelitian ini dimaksudkan untuk bisa menjawab mengenai masalah – masalah mengenai strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini sumber–sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber–sumber asli atau pihak–pihak terkait. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dimaksudkan untuk bisa menjawab pertanyaan–pertanyaan dalam penelitian. Adapun sumber–sumber data dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak–pihak terkait

pemangku kepentingan yang mengetahui segala permasalahan–permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder disini diperoleh dari:

- a. Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014.
- b. Data–data dari media on–line yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keberhasilan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber–sumber data yang dibutuhkan, antara lain:

1. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak–pihak terkait yang berkompeten dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

2. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke obyek peneliti yaitu ke kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

3. Studi Literatur

Sumber-sumber yang dapat dijadikan untuk bahan masukan referensi dalam penelitian ini yaitu: data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Kabupaten Klaten dari Tahun 2011 – 2014.

F. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini alat analisa yang digunakan adalah menggunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti , 2015:19). Analisis ini berdasarkan logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses dalam pengambilan setiap keputusan yang strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang ada. Dengan demikian dalam setiap perencanaan strategis (*Strategic Planner*) harus selalu menganalisa faktor-faktor yang menjadi kekuatan

(*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Penelitian dalam Analisis SWOT dengan membandingkan antara faktor internal dengan tujuan untuk mendapatkan faktor–faktor yang menjadi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) organisasi dan faktor eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan faktor–faktor yang menjadi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2015 : 31).

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal dan eksterna.

Dalam penelitian ini alat yang dipakai untuk menyusun faktor– faktor strategis adalah dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis dipaparkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel : 3.1

IFAS dan EFAS

<p style="text-align: center;">IFAS EFAS</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S) KEKUATAN</p>	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W) KELEMAHAN</p>
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O) PELUANG</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p>
<p style="text-align: center;">THREATS (T) ANCAMAN</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI ST</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI WT</p>

Sumber : Rangkuti (2015 : 194)

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada.

(Rangkuti,2015:83–87).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis.

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW). Kabupaten Klaten terletak antara $7^{\circ}32'19''$ Lintang Selatan $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}26'14''$ Bujur Timur sampai $110^{\circ}47'51''$ Bujur Timur. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Klaten adalah:

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Sleman
- 3) Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- 4) Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

Secara administrasi Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655.56 km²) atau seluas 2,014 % dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang luasnya seluas 3.254.412 ha. Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut) yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah:

- 1) Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area miring) yang meliputi: Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
- 2) Wilayah datar (Wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karangnongko, Polanharjo.
- 3) Wilayah berbukit/gunung kapur (Wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno.

Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada peta 4.1 sebagai berikut:

Peta 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Klaten



Ditinjau dari ketinggian, wilayah Kabupaten Klaten terbagi antara lain, sebanyak 9.72 % terletak di antara 0 – 100 m dpl, sebanyak 77,52 % terletak antara 100 – 500 m dpl, dan sebanyak 12,76 5 terletak antara 500 – 1000 m dpl. Gambaran secara ringkas deskripsi karakteristik geografis Kabupaten Klaten, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Klaten

Karakteristik Daerah	Uraian / Keterangan
Letak	Antara 110 ⁰ 30' s/d 110 ⁰ 45' Bujur Timur dan antara 70 ⁰ 30' s/d 7 ⁰ 45' Lintang Selatan
Batas	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul - Sebelah Barat : Kabupaten Sleman - Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali - Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
Ketinggian	<ul style="list-style-type: none"> - 3.72% terletak pd ketinggian 0 – 100 m dpl - 77,52% terletak pd ketinggian 100 – 500 m dpl - 21,765 terletak pd ketinggian 500 – 1000 m dpl
Hujan	Kabupaten Klaten mempunyai hari hujan dalam satu tahun dengan rata di bawah 125 hari dengan curah hujan rata-rata dibawah 2.635 mm per tahun.

<p>Bahan Tambang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Litisol : bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis, terdapat di daerah Kecamatan Bayat. 2. Regosol Kelabu : bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom. 3. Glumusol Kelabu Tua : bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. 4. Kompleks Regasol Kelabu dan Kelabu Tua : bahan induk berupa batu kapur napal, terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengan dan Kalikotes sebelah selatan. 5. Regasol Coklat Keabuan : bahan induk berupa abu dan pasir vulkan, terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Jogonalan.
----------------------	---

Sumber : Bapeda Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu penyangga pangan khususnya padi bagi kabupaten di sekitar wilayah Jawa Tengah.

Besarnya luas lahan dan persentase lahan sawah yang berigasi , daerah Kabupaten Klaten termasuk daerah yang relatif subur dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai agropolitan yaitu suatu kawasan yang berbasis ekonomi masyarakat khususnya sektor pertanian yang berlanjut. Seiring dengan perkembangan waktu, dari tahun ke tahun terus terjadi pergeseran dan perubahan lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian yang terus mengalami peningkatan.

Luas peralihan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian terus mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Peruntukan lahan perumahan meningkat dari 21.689 Ha (2007) menjadi 16.704 Ha (2008) dan pada tahun 2009 menjadi seluas 48.464 Ha. Selain itu lahan bagi industri juga mengalami peningkatan dari 4.980 Ha (2007) menjadi 3.104 Ha (2008) dan pada tahun 2009 menjadi 31.794 Ha.

Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kondisi Lahan dan Penggunaanya
Di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 (Ha)

Luas Pengguna Lahan (Ha)			
	2007	2008	2009
a. Pertanian dan non Pertanian			
1. Pertanian	33.435	33.423	39.796
2. Non Pertanian	32.121	32.133	25.760
b. Jenis Lahan Sawah			

1.	Pengairan Teknis	19.942	19.915	19.193
2.	Pengairan ½ Teknis	10.086	9.778	10.099
3.	Pengairan Sederhana	2.567	2.267	2.657
4.	Tadah Hujan	1.112	1.463	1.463
c. Pengguna Lahan Non Pertanian				
1.	Rumah dan Bangunan	19.995	20.022	20.032
2.	Hutan Negara	1.450	1.450	1.450
3.	Rawa-rawa	180	180	180
4.	Lain-lain	10.496	10.481	4.098
d. Perubahan Penggunaan Lahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Perubahan dari Sawah dan Tegal.				
1.	Perumahan	21.689	16.704	48.464
2.	Industri	4.980	3.104	31.794
3.	Perusahaan	3.201	3.619	15.313
4.	Jasa	3.253	1.856	15.677
e. Luas Lahan Kritis				
1.	Kritis	-	-	-
2.	Agak Kritis	563.07	2.635.00	505.00
3.	Potensial Kritis	4.293.98	-	1.650.00

Sumber : Klaten Dalam Angka

2. Aspek Demografi.

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 1.144.040 jiwa, pada tahun 2012 sebesar 1.316.907 jiwa, pada tahun 2013 sebesar 1.313.914 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.311.019. 637.939 jiwa.

3. Aspek Potensi Daerah.

Pengembangan potensi pariwisata di pemerintah daerah kabupaten Klaten dapat dilihat dari hasil pasar wisata dan hasil produk wisata yang bisa disediakan. Hasil produk wisata terdiri dari macam obyek pariwisata dan daya tarik wisata, macam fasilitas pelayanan wisata yang ditawarkan serta aksesibilitas. Sedangkan yang termasuk pasar wisata antara lain wisata lokal, wisata regional, maupun manca negara. Adapun jenis pariwisata dikelompokkan menjadi:

1. Kekayaan Wisata Alam.

Jenis kekayaan ini merupakan jenis pariwisata yang bersifat alam yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun macam obyek dapat dilihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Nama dan Jenis Obyek Wisata Serta Lokasi

Di Kabupaten Klaten

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek	Lokasi
1.	Perayaan Padusan	Even Tradisional	Kec. Tulung
2.	Perayaan Maleman	Even Tradisional	Kec. Klaten Utara
3.	Perayaan Syawalan	Even Tradisional	Kec. Bayat dan Kalikotes
4.	Perayaan Yaqowiyu	Even Tradisional	Kec. Jatinom
5.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
6.	Sumber Air Ingas	Wisata Alam	Kec. Tulung
7.	Makam Pandanaran	Wisata Relegi	Kec. Bayat
8.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
9.	Makam RNB Ronggowarsito	Wisata Relegi	Kec. Trucuk
10.	Makam Perwita	Wisata Relegi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karangnom
12.	Candi Plaosan	Wisata Budaya	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Ageng Gribik	Wisata Relegi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper

Sumber : Bapeda Kabupaten Klaten.

2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya yang di miliki daerah Kabupaten Klaten antara lain berupa: Candi Sewu, Candi Sona (Asu), Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sojiwan, Candi Karangnongko, Candi Merak, Masjid Jawi, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Makam Ronggowarsito, Makam Ki Ageng Gribik, Situs Kaliworo, Situs Wonoboyo.

3. Tempat Bersejarah.

Tempat bersejarah yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Klaten antara lain meliputi: Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Monumen PARATA Pos X -1 dan Museum Gula Jawa Tengah di Gondang Baru.

4. Sarana Perhotelan/Penginapan.

Perhotelan/Penginapan yang ada di kabupaten Klaten sebanyak 42 hotel/penginapan masih dikategorikan dalam Hotel Melatai I, Hotel Melati II, Hotel Melati III dan Hotel Bintang 2 hanya 1 jumlahnya.

Hotel Melati I

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Hotel Perdana Raya | 17. Hotel Semar |
| 2. Hotel Puri Jonggrangan | 18. Hotel Restu Ibu 1 |
| 3. Hotel Arjuna | 19. Hotel Sari |
| 4. Hotel Klaten Indah 2 | 20. Hotel Shinta |
| 5. Hotel Merak Indah | 21. Hotel Sri Rejeki |
| 6. Hotel Merak 1 | 22. Hotel Srikandi 1 |

7. Hotel Agung
8. Hotel Asri
9. Hotel Kenanga 1
10. Hotel Kenanga 2
11. Hotel Mawar 1
12. Hotel Mawar 2
13. Hotel Mawar 3
14. Hotel Merdeka 3
15. Hotel Pratiwi
16. Hotel Prima
23. Hotel Ramayana
24. Hotel Pramesti
25. Hotel Wisnu
26. Hotel Shinta
27. Hotel Popy
28. Hotel Victoria
29. Hotel Surya Andesa
30. Hotel Ayu
31. Hotel Jaya Kusuma
34. Hotel Srikandi 2
35. Hotel Restu Ibu 2

Hotel Melati II

1. Hotel Prambanan Indah
2. Hotel Alami
3. Hotel Kendedes
4. Hotel Graha Srikandi
5. Hotel Alamanda
6. Hotel Botan
7. Hotel Bima

Hotel Melati III

1. Hotel Galuh
2. Hotel Candi View

Hotel Bintang 2

1. Hotel Grand Cokro

Sumber : Bapeda Kabupaten Klaten.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004, khususnya pasal 1 (12) menyebutkan, bahwa Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2005 – 2025 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya“*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sejahtera, Yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat mencukupi kebutuhan

hidupnya secara adil dan merata yang meliputi kebutuhan lahiriah berupa: sandang, pangan, papan dan kesehatan serta kebutuhan batiniah yang meliputi: rasa aman, rasa tentram dan rasa damai. Sedangkan indikator dalam kondisi sejahtera yang dimaksud adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- 3) Berketuhanan, yang dimaksud ber Ketuhanan adalah masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis. Indikator tercipta masyarakat berke Tuhanan antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas keimanan pemeluk keagamaan, yang ditandai dengan maraknya kegiatan keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, untuk saling hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 4) Cerdas, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sains (IPTEK), serta mampu menerapkan dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator terciptanya masyarakat yang cerdas antara lain adalah: responsif terhadap situasi yang dihadapi,

cerdas dalam memahami masalah dan bijak dalam pengambilan keputusan.

- 5) Mandiri, Yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator Kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa.
- 6) Berbudaya, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya sebagai adat-istiadat. Indikator tercapainya masyarakat Kabupaten Klaten yang berbudaya antara lain taat azas pada ketentuan perundangan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengembangkan nilai moral keagamaan dan mempertebal jiwa gotong-royong dalam hidup berbangsa dan bernegara.

(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. No.5 Tahun 2011)

2. Misi

Misi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 (13) menyebutkan bahwa yang dimaksud Misi adalah rumusan

mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
- 3) Mewujudkan otonomi daerah yang bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.
- 5) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman, dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya

kehidupan masyarakat dan penegak HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.

- 6) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. No.5 Tahun 2011).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah sesuatu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.
- 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

- 3) Terwujudnya otonomi daerah bersendi tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 4) Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana yang menunjukkan pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 5) Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
- 6) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan Bersih Sehat Indah Aman dan Rapi (BERSINAR).
(Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.5 Tahun 2011).

C. Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.10 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Daerah. Dengan berpedoman dengan Peraturan Daerah tersebut, maka analisis dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan pos–pos APBD dan laporan keuangan daerah secara umum. Dalam kebijakan APBD merupakan komitmen politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mendanai program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan riil dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sehingga masyarakat mampu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan memberikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Klaten semakin mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah di prioritaskan untuk:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi antara lain melalui peningkatan pengembangan ekspor non migas, meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata, meningkatkan revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan dan meningkatkan tumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM)/Usaha Kecil Menengah yang ada.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain meningkatkan sistem pelayanan yang ada dan meningkatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat antara lain mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan mendorong sektor pendidikan yang ada untuk terus berkembang.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Klaten tidak terlepas dari kondisi dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari total pendapatan daerah yang diterimanya. Dalam hal ini pertumbuhan pendapatan dapat dilihat melalui Laporan Realisasi APBD . Gambaran umum pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
 Tahun 2011 – 2014

Tahun	Pendapatan (RP)	Pertumbuhan (%)
2011	1.364.124.811.662	
2012	1.511.542.004.720	10,81 %
2013	1.735.589.679.346	14,82 %
2014	1.919.961.769.290	10,62 %

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten, Tahun 2011 – 2014
 (Diolah).

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa, dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014, pendapatan daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan besarnya pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.364.124.662, di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1511.542.004.720 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 10,81 %. Pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 1.735.589.679.346 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 14,82 % . Begitu juga pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.919.961.769.290 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 10,82 % .

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada alokasi pendapatan daerah yang diterimanya, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	APBD (Rp)			
		2011	2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	72.290.993.848	84.755.837.704	115.441.420.053	117.922.415.860
2	Dana Perimbangan	920.807.670.268	1.098.162.417.447	1.174.619.195.741	1.250.626.353.033
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	371.026.147.546	328.623.752.569	445.529.063.552	491.413.000.397
	Jumlah	1.364.124.811.662	1.511.542.004.720	1.735.589.679.346	1.919.961.769.290

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014

Dari data yang dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas, maka dapat diketahui kontribusi dari masing-masing alokasi pendapatan yang dapat dipaparkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Realisasi Kontribusi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	APBD			
		2011	2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	5,30 %	5,61 %	6,65 %	9,27 %
2	Dana Perimbangan	67,50 %	72,65 %	67,68 %	65,14 %
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	27,20 %	21,74 %	25,67 %	25,60 %

Dengan melihat hasil tabel 4.5 dan tabel 4.6 diatas, maka dapat diketahui pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan masih selalu mendominasi dengan persentase sebagai berikut: pada tahun 2011 besarnya pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 920.807.670.268 (67 %), pada tahun 2012 besarnya dana perimbangan Rp 1.098.162.417.447 (72,65%), pada tahun 2013 besarnya dana perimbangan Rp 1.174.619.195.741 (67,68%) dan pada tahun 2014 besarnya dana perimbangan Rp 1.250.626.353.033 (65,14%). Sedangkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan dari tahun 2011 – 2014 selalu mengalami peningkatan, walaupun besar kontribusi secara persentase masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah daerah Kabupaten Klaten terus berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alokasi sumber pendapatan daerah yang berfungsi membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian pendapatan dari alokasi PAD harus selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sendiri dan tidak banyak berharap bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dari Tahun 2011 – 2014 dapat dipaparkan dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten
Tahun 2011 - 2014

No	URAIAN	TAHUN (Rp)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pajak Daerah	28.261.724.817	30.472.348.079	52.818.646.651	62.623.053.793
2.	Retribusi Daerah	15.532.736.612	19.209.149.223	21.631.662.941	21.220.132.236
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.796.358.337	4.058.529.690	5.586.865.621	6.902.381.491
4.	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.700.174.082	31.015.807.712	35.403.914.840	87.176.848.340

Total PAD	72.290.993.848	84.755.834.704	115.441.420.053	177.922.415.860
------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014

Dari bersumber pada tabel 4.7, maka dapat diketahui persentase kontribusi tiap alokasi pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kontribusi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2014

NO	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pajak Daerah	39,09 %	35.95 %	45.75 %	35,20 %
2.	Retribusi Daerah	21,49 %	22.66 %	18.74 %	11.97 %
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,25 %	4,79 %	4.84 %	3.88 %
4.	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,17 %	36.6 %	30.67 %	49 %

Dengan melihat data pada tabel 4.7 dan tabel 4.8, maka komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014 adalah pada tahun 2011 alokasi sumber pendapatan terbesar berasal

dari pajak daerah sebesar Rp. 28.261.724.817 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 39,09%, pada tahun 2012 masih berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 30.472.348.079 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 35,95%, pada tahun 2013 sumber pendapatan terbesar masih berasal dari pajak daerah yaitu sebesar Rp. 52.818.646.651 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 45,75 % dan pada tahun 2014 sumber pendapatan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 87.176.848.34 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 49 %. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan daerah selama 3 tahun dari tahun 2011-2013 berasal dari pajak daerah dan pada tahun 2014 pendapatan daerah terbesar dari alokasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah hal ini berarti pendapatan dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten. Dilihat dari alokasi retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2014 secara numerik dari tahun ke tahun mengalami naik-turun, dimana hasil retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 15.532.736.612 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 21,49 %, pada tahun 2012 sebesar Rp 19.209.149.223 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 18,74%, pada tahun 2013 sebesar Rp 21.631.992.941 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 11,93 % dan pada tahun 2014 sebesar Rp 21.220.132.236 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 22,66 %. Sedangkan

penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2011 – 2014 memberikan kontribusi yang masih kecil yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 3.796.358.337 (5,25%), pada tahun 2012 sebesar Rp 4.058.529.690 (4,84%). Pada tahun 2013 sebesar Rp 5.586.865.621 (3,88%) dan pada tahun 2014 sebesar Rp 6.902.381.491 (4,79%). Dengan melihat data diatas, sangat diperlukan kebijakan untuk lebih mengintensifkan obyek penerimaan, dengan harapan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan. Berikut dipaparkan tabel 4.9 mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Tabel : 4.9

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 – 2014

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	72.290.993.848	
2012	84.755.834.704	17,24 %
2013	115.441.420.053	36,21 %
2014	177.922.415.860	54,12 %

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa tingkat persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat tiap-tiap

tahun, pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sebesar Rp 72.290.993.848 di tahun 2012 sebesar Rp 84.755.834.704 mengalami pertumbuhan sebesar 17,24 % dan pada tahun 2013 sebesar Rp 115.441.420.053 dengan pertumbuhan sebesar 36,21 % dan pada tahun 2014 sebesar Rp 177.922.415.860 meningkat sebesar 54,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap tahunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 -2014 selalu mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan besarnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 - 2014 secara lengkap dapat dipaparkan pada tabel 4. 10 sebagai berikut:

STIE Widya Winaha
Jangan Plagiat

Tabel 4 : 10

Jenis dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2011-2014

URAIAN	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Asli Daerah	72.290.993.848	84.755.834.704	115.441.420.053	177.922.415.860
Pendapatan Pajak Daerah	28.261.724.817	30.472.348.079	52.818.646.651	62.623.053.793
- Pajak Hotel	171.225.432	191.366.103	603.080.263	720.156.384
- Pajak Restoran	378.292.337	441.427.846	1.663.852.489	1.949.807.473
- Pajak Hiburan	564.964.267	1.219.890.196	356.530.439	387.128.516
- Pajak Reklame	1.775.518.941	1.921.446.064	2.830.287.910	2.891.652.139
- Pajak Penerangan Jalan	18.522.248.281	19.810.480.435	22.786.247.424	26.464.577.868
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.880.864.000	0	0	0

- Pajak Parkir	145.581.253	300.677.038	352.014.425	352.496.525
- Pajak Air Bawah Tanah	601.963.560	66.209.400	831.211.306	1418.421.740
- Pajak Sarang Burung Walet	0	1.750.000	0	0
- Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	0	1.494.104.000	1.778.362.850	2.127.902.000
- Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0	0	14.365.019	18.608.054.885
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.221.066.746	4.426.996.997	7.252.040.495	7.702.856.179

STIE Widya Widaha
Jangan Plagiat

Hasil Retribusi Daerah	15.532.736.612	19.209.149.223	21.631.992.941	21.220.132.236
- Retribusi Jasa Umum	11.941.506.415	14.761.548.300	16.515.296.105	15.982.276.140
- Retribusi Jasa Usaha	1.917.203.518	2.384.644.196	2.246.361.625	2.650.367.009
- Retribusi Perizinan Tertentu	1.674.026.679	2.060.956.727	2.870.335.211	2.587.489.087
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.796.358.337	4.058.529.690	5.586.865.621	6.902.381.491
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	3.796.358.337	4.058.529.690	5.586.865.621	6.902.381.491
Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.700.174.082	31.015.807.712	35.403.914.840	87.176.848.340
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	216.270.900	1.578.678.020	410.115.157	275.167.793

- Penerimaan Jasa Giro	7.507.743.741	12.966.786.067	15.962.297.751	12.363.710.452
- Penerimaan Bunga Deposito	477.099.910	0	2.423.287.685	15.256.321.841
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	45.220.200	584.534.430	70.250.000	104.986.500
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	939.092.486	431.558.712
- Pendapatan dan Pengembalian	0	0	49.878.083	318.610.740
- Penerimaan Lain-lain	16.453.839.331	128.163.048	15.522.150.542	17.395.073.768
- Dana Kapitasi JKN	0	0	0	41.029.418.534

DANA PERIMBANGAN	920.807.670.268	1.098.162.417.447	1.174.619.195.741	1.250.625.353.033
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.560.800.268	56.376.058.447	47.125.348.741	41.463.345.033
- Bagi hasil Pajak	35.963.808.795	43.673.339.813	30.890.434.168	27.924.957.463
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.596.991.473	12.700.718.634	16.234.914.573	13.538.387.570
Dana Alokasi Umum	793.292.770.000	967.284.829.000	1.066.318.427.000	1.142.586.588.000
Dana Alokasi Umum	793.292.770.000	967.284.829.000	1.066.318.427.000	1.142.586.588.000
Dana Alokasi Khusus	80.954.100.000	74.501.530.000	61.175.420.000	66.576.420.000
Dana Alokasi Khusus	80.954.100.000	74.501.530.000	61.175.420.000	66.576.420.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	371.026.147.546	328.623.752.569	445.529.063.552	491.413.000.397
Pendapatan Hibah	6.000.000.000	0	1.809.833.374	1.053.091.397
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.000.000.000	0	1.809.833.374	1.053.091.397
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	57.577.102.420	77.383.458.006	87.633.165.698	115.022.833.000

Dana Bagi Hasil Pajak & Provinsi Jawa Tengah	57.577.102.420	77.383.458.006	87.633.165.698	115.022.833.000
Dana Penyesuaian & otonomi Khusus	166.821.784.680	207.721.763.000	319.829.819.000	30.400.751.000
Dana Penyesuaian	166.821.784.680	207.721.763.000	319.829.819.000	30.400.751.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.333.716.446	43.518.513.563	36.256.245.480	67.936.325.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.	45.333.716.446	43.518.513.563	36.256.245.480	67.936.325.000
Penerimaan Lainnya	95.293.544.000	0	1.621.602.407.460	0
Penerimaan Lainnya	95.293.544.000	0	1.621.602.407.460	0

LRA APBD Kabupaten Klaten Tahun 2011-2014

Dengan melihat tabel 4.10 diatas dapat dilihat besarnya pendapatan yang di peroleh dari masing-masing jenis pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam 4 tahun dari tahun 2011 – 2014 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dengan menambah obyek pajak baru dan identifikasi sumber pendapatan.

Pada jenis pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam usaha meningkatkan pendapatannya dengan mengambil kebijakan manambah obyek pajak baru yaitu mulai tahun 2012 menambahkan pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana di setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan besarnya jumlah pendapatan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.494.104.000, pada tahun 2013 sebesar Rp1.778.362.850 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 2.127.902.000. Dan menambah obyek pajak bumi & bangunan perdesaan dan perkotaan mulai tahun 2013 dengan besarnya pendapatan di tahun 2013 Rp 14.365.019.050 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 18.608.054.885.

Besarnya pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Klaten selama 4 tahun dari tahun 2011 – 2014 selalu mengalami peningkatan. Namun besarnya pendapatan retribusi daerah terbesar berasal dari retribusi jasa umum dengan besar pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp 11.941.506.415, pada tahun 2012 sebesar 14.761.548.300, pada tahun

2013 sebesar Rp 16.515.296.105 dan pada tahun 2014 sebesar 15.982.276.140.

Besarnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

Pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam usaha meningkatkan pendapatannya dengan mengambil kebijakan menambah beberapa obyek penerimaan baru antara lain: mulai tahun 2013 pemerintah daerah Kabupaten Klaten menambahkan penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan & pengambilan.

Begitu juga pada jenis pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah dari tahun 2011 – 2014 mengalami peningkatan.

D. Analisis dan Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan besar kecilnya kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah digunakan alat analisa sebagai berikut: (Halim, 2004 :150)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Psi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumusan diatas, maka jumlah penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten selama 4 tahun dari tahun 2011 – 2014 dapat diketahui besarnya rasio dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 - 2014 dipaparkan dalam tabel 4.11. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten 2011 – 2014 dipaparkan dalam tabel 4.12 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel. 4.11

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 – 2014

No	Tahun	APBD		
		PAD (Rp)	Subsidi (Rp)	Rasio Kemandirian
1.	2011	72.290.993.848	920.807.670.268	7,85 %
2.	2012	84.755.834.704	1.096.162.417.447	7,73 %
3.	2013	115.441.420.053	1.174.619.195.741	9,83 %
4.	2014	177.922.415.860	1.250.626.363.033	14,22 %

Tabel 4.12

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2011 – 2014

Tahun	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Keterangan
2011	7.85 %	Sangat Kurang
2012	7.73 %	Sangat Kurang
2013	9.83 %	Sangat Kurang
2014	14,22 %	Kurang

Dengan melihat tabel 4.11 dan tabel 4.12 tersebut diatas dapat dilihat tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2011 – 2014 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Pada tahun 2011 – 2013 berada pada kategori sangat kurang (berada pada kisaran $< 10,00$ %) dan pada tahun 2014 berada pada kategori kurang (berada pada kisaran $10,01 - 20,00$ %), Sedangkan rata-rata rasio kemandirian daerah selama 4 tahun dari tahun 2011 – 2014 adalah sebesar 9.90 % artinya angka rasio kemandirian daerah rata-rata selama 4 tahun berdasarkan kriteria Litbang Depdagri masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari alokasi Pendapatan Asli Daerah belum mampu menyumbangkan banyak pendapatan yang

berfungsi untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah. Walaupun demikian besarnya rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2011 - 2014 disetiap tahunnya sudah berhasil mengalami peningkatan. Namun dari tabel 4.11 di atas besarnya subsidi dari tahun 2011 – 2014 juga terus mengalami peningkatan. Dengan kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya, pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Klaten melalui ekstensifikasi dan intensifikasi semua sumber pendapatan daerah.

E. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dari berbagai pihak sebagai berikut:

1. Drs. Harjanto. Kepala Bidang DPPKAD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Klaten, berkepentingan untuk mencatat dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Berikut ini kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

Mengenai keuangan daerah :

Kondisi keuangan daerah kita sampai saat ini memang diakui masih sangat kurang, baik itu dilihat dari tingkat pertumbuhan maupun tingkat kemandirian yang masih berkisar sekitar 10 %.

Tetapi, bila kita lihat kebelakang dari tahun ke tahun sudah mengalami kenaikan dan kita berusaha untuk selalu meningkat. Walaupun persentase peningkatannya belum signifikan yaa. Memang terasa berat untuk mencapai kemandirian untuk ukuran wilayah kita. Tapi setiap tahun kita tetap punya target, punya kiat-kiat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Yang menjadi prioritas peningkatan pendapatan adalah masih dari sektor pajak dan retribusi tentunya. Untuk sektor retribusi contohnya masih banyak kebocoran-kebocoran disana-sini. Misalnya karcis parkir pinggir jalan, itu juga mengalami kebocoran dalam penarikan dilapangan.

Peraturan Daerah yang mendukung mengenai retribusi parkir .

Ada sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.18 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Parkir Pinggir Jalan Umum. Dalam perda itu besarnya tarif parkir untuk sepeda motor Rp 500 tetapi pelaksanaan dilapangan sebesar Rp 1000 untuk Roda 4 sesuai perda tarif parkir sebesar Rp 1000 tetapi pelaksanaan di lapangan masyarakat ditarik sebesar Rp 2000.

Untuk Pajak Pengambilan Bahan Galian C

Pajak pengambilan bahan galian C itu juga tingkat kebocorannya masih tinggi sampai sekarang, banyak pengusaha menghindar, kadang apabila dirasional hasil pajak dari pengambilan bahan galian C tidak sebanding dengan kerusakan jalan.

Target untuk tambang galian C

Hasil tambang galian C memang menjadi salah satu target dari PAD. Seperti tahun kemarin hasil tambang pasir hanya Rp 750 juta, untuk tahun ke depan seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi.

Langkah yang diambil

Mempermudah ijin tambang pasir, dengan demikian pendapatan juga akan meningkat. Selain itu merubah sistem penarikan pajaknya biasanya diberikan dengan sistem tiket, berubah dengan petugas yang langsung menarik ke lapangan. Karena yang dulu dianggap rawan terjadi kebocoran.

Terkait dengan target, apa yang menjadi kebijakan bapak?

Ya, setiap tahun memang harus ada target dan harus ada program.

Program yang pertama tentunya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang berkompeten dalam PAD ini. Kita tingkatkan SDM yang kita

punya, kita bina, kita beri arahan, dan kita awasi. Agar target terpenuhi tentunya.

Pengembangan di Dinas lain

Selalu ada, sebagai contoh di dinas perindustrian. Data yang masuk jumlah Industri Kecil Menengah sebanyak 54.000 di seluruh kabupaten Klaten. Tetapi dari jumlah itu IKM yang siap menghadapi MEA hanya 10 %. Ini dikarenakan salah satunya mengalami kesulitan di perizinan dan proses produksi banyak kendala-kendala yang dijumpai antara lain: Sebagai contoh industri garmen Industri Garmen yang ada berupa industri skala kecil. Mesin yang dipakai untuk produksi masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sehingga corak dan kualitas juga belum bisa bersaing. Selain itu keterbatasan dana para IKM kesulitan dalam mendapatkan standarisasi produk, selain itu untuk mendapatkan logo SNI itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak gampang. Untuk mengatasi hal tersebut Disperindag melakukan terobosan dengan cara memberi pembinaan serta mendampingi IMK untuk mencari ijin standarisasi.

Industri kecil selain industri garmen masih ada

Masih banyak, antara lain sentra industri mote yang terdapat di Kecamatan Karangnom, industri payung kertas yang ada di Kecamatan Cawas, industri konveksi yang ada di Kecamatan Wedi, industri gerabah yang ada di Kecamatan Bayat.

Yang menjadi permasalahan industri kecil

Kurangnya modal.

Selain itu nilai dolar yang terus naik turun itu juga sangat menyulitkan pengusaha.

Usaha untuk meningkatkan PAD

Untuk memaksimalkan lagi pendapatan khususnya di sektor pajak dan retribusi tentunya. yang lebih bisa digenjot lagi terutama di sektor pariwisata, parkir, jasa umum, dan PBB (pajak bumi dan bangunan).

2. Drs Sri Yanto. Sebagai Anggota DPRD komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan.

Keunggulan daerah Kabupaten Klaten

Yang menjadi keunggulan antara lain letak geografis yang berada diantara 2 kota besar yaitu Yogyakarta dan Solo. Ini akan memberi dampak positif yang cukup besar bagi Kabupaten Klaten selain itu memiliki tanah yang subur , air yang melimpah. Produksi pertanian daerah Klaten masih menjadi daerah penyangga pangan untuk daerah sekitar.

Mengenai Keuangan Daerah

Kondisi keuangan pemerintah daerah sini memang kurang, belum bisa untuk mandiri dan masih tergantung dengan pemerintah pusat. Untuk itu perlu kita gali, kita pelajari lagi sumber-sumber pendapatan kita, kita cari bersama-sama kebocoran-kebocoran yang ada dilapangan.

Apa yang menjadi prioritas bapak?

Ya...selaku anggota dewan apalagi saya membidangi komisi 2. Tentunya prioritas utama saya bersama teman-teman adalah mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten. Bagai mana caranya untuk perekonomian daerah Kabupaten Klaten dapat terus berkembang.

Misalnya, kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau peneliti-peneliti, ini ditujukan untuk lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga dapat menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah.

Banyak peraturan daerah yang tumpang tindih.

Ya memang di lapangan banyak terdapat itu. Kita tidak bisa berbuat banyak dikarenakan masih adanya peraturan yang tumpang tindih. Kalau begini pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa, selama peraturan itu belum dirubah atau belum ada peraturan yang menaunginya.

Untuk itu perlu duduk bersama antara instansi terkait, anggota dewan dan masyarakat yang berkompeten. Kita sama-sama berpikir, sama-sama cari solusi dan sama-sama cari pemecahan. Dimana hasilnya akan menjadi peraturan daerah yang baru.

Selama ini pendapatan dari perusahaan daerah masih kecil kebijakan yang diambil.

Bila dibanding dengan sektor lain, memang ini yang paling kecil. Kita tetap mendorong agar perusahaan daerah tetap terus berkembang. Disini ada 3 perusahaan daerah yang pertama Bank Klaten, PDAM dan CV. Aneka Usaha. Agar perusahaan terus dapat berkembang, salah satu usaha dari kami adalah merubah bentuk badan hukum yang semula dari BPR Bank Klaten menjadi PT Bank Klaten dan perubahan status bentuk hukum dari CV Aneka Usaha menjadi PT. Aneka Usaha masih dalam proses.

3. Muh Anwar Sodik Spm.M, KABID DPK DPU

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Ya betul. Pendapatan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum tergolong kecil dan tergolong dari pendapatan retribusi. Pendapatan retribusi hanya meliputi retribusi sampah, retribusi kebersihan, retribusi makan. Dan yang terbesar dari retribusi sampah. Untuk retribusi makam besarnya tidak seberapa, karena hanya beberapa makam saja.

Kendala yang dihadapi

Di lapangan masih banyak kendala-kendala yang belum teratasi. Sebenarnya dilihat dari permintaan pasar, setiap tahun permintaan masyarakat untuk mengangkut sampah terus bertambah, tidak hanya di kota. Di desa pun demikian, mereka mulai kesulitan dalam membuang sampah rumah tangga. Tetapi di pihak kami tidak semuanya permintaan dapat di layani. Ini dikarenakan Jumlah armada yang tersedia masih terbatas, tenaga untuk bongkar muat sampah juga masih kurang. Dan yang tidak kalah penting keberadaan tempat pembuangan sampah (TPA) juga dirasa masih kurang. Yang terakhir ini sering menjadi kontroversi dengan masyarakat.

4. Ir. Indro Susilo . Wakil Disbudparpora

Kontribusi Dispora terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi Disbudparpora terhadap PAD ada. Bahkan untuk tahun ini target PAD dari sektor Disbudparpora terpenuhi. Sedangkan tempat pariwisata yang paling banyak menyumbang PAD adalah Obyek Mata Air Cokro (Omac). Disbudparpora disini salah satunya adalah sebagai mitra ajang promosi dan pembinaan dari dinas terkait. Misalkan diadakan even-even memperingati hari-hari tertentu

Seperti Carnaval Lurik Klaten ini terlaksana berkat kerjasama antara industri lurik daerah, pemerintah daerah dan instansi terkait, tujuannya

adalah guna mengangkat pamor lurik di mata nasional. Selain itu pada bulan agustus kemarin membuat even Festival Musik Gejog Lesung di Kecamatan Cawas dimaksudkan untuk mengangkat desa Cawas sebagai daerah lumbung padi di mata nasional.

Strategi untuk meningkatkan pendapatan

Strategi yang kami pakai salah satunya memaksimalkan obyek wisata yang ada dengan cara promosi dan meningkatkan sarana prasarana. Misalnya obyek wisata dibuat lebih menarik seperti pada musim liburan buat panggung musik atau ditambah wahana baru. Sehingga diharapkan pengunjung merasa puas dan nyaman. Dan saya berharap dengan strategi ini akan dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi.

5. Erly Ruswati. Sekdes Desa Karang

Sumber pendapatan daerah

Pendapatan daerah terbesar berasal dari pajak daerah paling besar berasal dari pajak PBB. Sedangkan pendapatan dari pendapatan retribusi tidak banyak.

Kesulitan yang dihadapi

Kesulitan yang masih terus ada, masyarakat masih belum sadar membayar pajak. mereka belum mau datang sendiri untuk melunasi PBB. Kalau kita menunggu ya kapan selesainya? Kalau sudah demikian, kami

sebagai petugas pungut penarikan pajak PBB mau tidak mau harus turun. Kita lakukan dengan cara jemput bola, kita masuk dari rumah ke rumah. Terkadang langsung dibayar, kadang ada juga yang harus kembali karena belum siap uang.

Terobosan dalam pembayaran pajak

Pemerintah daerah sebetulnya sudah melakukan banyak terobosan. Untuk mempermudah rakyat dalam membayar. Sekarang pembayaran pajak bisa melalui Bank, Kantor Pos atau langsung bisa dibayar di kantor DPPKAD sendiri.

Adakah Peraturan Daerah yang mengaturnya?

Ada Perda Kabupaten Klaten no. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Apakah ada target untuk pendapatan lain ?

Iya ada target, tapi banyak yang meleset. Kami sebagai pemungut kadang merasa kesulitan. Banyak aturan yang kurang mendukung bahkan ada yang tumpang tindih, jadi di lapangan kadang kesulitan sendiri.

Kebijakan yang diperlukan

Saya rasa yang pertama adalah mengadakan sosialisasi dan informasi ke masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi. yang kedua memberi pengarahan tata cara pemungutan pajak, ini masih banyak yang

bingung juga. Yang ketiga adalah menyediakan aturan-aturan yang jelas dan mendukung.

Dengan berdasarkan wawancara di atas, untuk mempermudah dalam penyampaian informasi tersebut, peneliti menggunakan kodefikasi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kebijakan
3. Fasilitas
4. Kesempatan
5. Aset
6. Sarana & Prasarana

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

E. Pembahasan

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <hr style="border: 0.5px solid blue;"/> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S)</p> <p style="text-align: center;">KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Geografis strategis antara 2 kota besar. 2. Tersedianya banyak lembaga keuangan (Bank dan Non Bank). 3. Dukungan dan peran pemerintah. 4. Tersedianya sarana dan prasarana. 5. Obyek wisata yang banyak. 6. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</p> <p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM yang besar. 2. Terjadi alih fungsi lahan. 3. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan investor. 2. Perkembangan teknologi. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah daerah untuk menarik investor dalam pengembangan/pemanfaatan kekayaan daerah. 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi secara optimal. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM. 2. Mengembangkan seni dan budaya daerah. 3. Meningkatkan penataan dan penanganan

3. Kerjasama dengan lembaga peneliti untuk pengembangan daerah. 4. Terbukanya sistem transportasi. 5. Otonomi Daerah	3. Meningkatkan perekonomian daerah. 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana. 5. Peningkatan modal pemerintah dan peran masyarakat dalam peningkatan perekonomian. 6. Mengevaluasi perda secara berkala.	masalah lahan. 4. Meningkatkan iklim usaha.
THREATS (T) ANCAMAN 1. Perlindungan pemerintah terhadap produk lokal masih rendah. 2. Fluktuasi nilai tukar rupiah. 3. Adanya praktek KKN.	STRATEGI ST 1. Meningkatkan daya saing produk daerah. 2. Mendorong partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan penegakan hukum.	STRATEGI WT 1. Peningkatan kualitas pelayanan. 2. Mengurangi KKN.

Dari hasil analisis lingkungan internal yang meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) serta lingkungan eksternal yang meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) dapat dirumuskan beberapa strategi umum yang dapat digunakan untuk memprioritaskan beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong untuk peningkatan

keberhasilan dalam mencapai tujuan, salah satunya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Klaten. Perumusan strategi – strategi yang diambil meliputi:

1. Strategi SO

Strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dalam hal ini strategi yang ditempuh melalui :

- a. Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong investor untuk bekerjasama dalam pemanfaatan dan pengolahan kekayaan daerah Kabupaten Klaten sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, seperti Bank Umum, BPR, Koperasi/BMT yang cukup banyak terdapat di kabupaten Klaten.
- c. Pemanfaatan perkembangan teknologi secara optimal dan tepat, melalui kemudahan mendapatkan akses yang dibutuhkan.
- d. Memanfaatkan sarana & prasarana yang tersedia dalam pengembangan perdagangan untuk meraih peluang pasar yang lebih besar.
- e. Meningkatkan penanaman modal pemerintah dan peningkatan peran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Klaten.

f. Meningkatkan dan mengefektifkan Peraturan Daerah secara berkala.

2. Strategi ST

Strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi yang ditempuh melalui :

- a. Meningkatkan daya saing bagi industri kecil, industri rumah tangga dan koperasi/UKM, perdagangan barang dan jasa, dengan cara mendorong dan merangsang produksinya guna dapat bersaing dengan barang import.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh guna meningkatkan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian penduduk guna mengatasi dan mengurangi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan dan ketertiban.

3. Strategi WO

Strategi yang digunakan dengan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi yang ditempuh melalui :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai bidang. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketrampilan maupun agama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih maju dan lebih baik.

- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Daerah, dengan cara meningkatkan penyelenggaraan even-even pada acara tertentu melalui kerjasama Disbudparpora dengan dinas terkait, meningkatkan pengembangan obyek wisata daerah, merangsang tumbuhnya hotel, rumah makan untuk menarik wisatawan.
- c. Meningkatkan penataan lahan dengan mengurangi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- d. Meningkatkan peran swasta, mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan daerah lain dalam pembangunan daerah.

4. Strategi WT

Strategi yang digunakan dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang ditempuh melalui :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan kepada aparat pemerintah guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatkan pengawasan dan kesadaran bagi aparat dalam meningkatkan kinerjanya guna mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dari matrik SWOT dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang paling tepat dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten dengan mengambil

strategi SO (*Strengths dan Opportunities*) yaitu menggunakan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian, hasil analisa dan pembahasan pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dan menyampaikan saran sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Kabupaten Klaten guna untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya dimasa-masa yang akan datang.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten selama 4 tahun masih sangat rendah dengan rata-rata persentase sebesar 9.91 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah kabupaten Klaten dalam pembiayaan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan masih sangat tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang dipakai dengan analisis SWOT dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

3. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah melalui peningkatan pendapatan daerah yang diterimanya antara lain dengan cara meningkatkan kerjasama dengan investor dalam mengelola kekayaan daerah, meningkatkan sektor pariwisata, meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi, pemanfaatan saran dan prasarana yang tersedia, meningkatkan penanaman modal pemerintah, meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah secara tepat dan optimal serta meningkatkan peran pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan.

B.SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk memperbaiki dan mengurangi ketergantungan daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan produk daerah terhadap produk import maupun produk dari daerah lain, melalui mempermudah pembuatan izin standarisasi, ISO dan melakukan pembinaan sehingga diharapkan produk daerah mampu bersaing dan terus berkembang.
2. Pemanfaatan dan penataan kembali alih fungsi lahan dari tanah pertanian ke non pertanian yang tepat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Klaten.

3. Meningkatkan sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi kualitas masyarakat juga lebih baik, sehingga lebih memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibanya.
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan merangsang investor untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan aktifitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, yang akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat merata dan dapat dirasakan di seluruh daerah.
5. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi secara optimal, dengan cara meningkatkan sistem manajemen penerimaan daerah yang meliputi: meningkatkan perluasan basis penerimaan, mengurangi kebocoran pendapatan, meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
6. Masih rendahnya rasio kemandirian hendaknya disikapi dengan melakukan penghematan/efisiensi dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, Seri Bung Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta , UPP STIM YKPN.

_____, (2014), *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.

_____, (2004), *Akutansi Kauangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.

Armada, *Strategi Peningkatan PAD* , <https://slideshare.net/mobile/zulfikri21/strategi-peningkatan-pad>.

Freddy Rangkuti, (2015), *Analisis SWOT*, Jakarta, PT Gramedia.

Mahmudi, (2006), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Mudrajad Kuncoro, (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta, Erlangga.

Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi

Sugiyono, (2015), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.

Syahrudin H. Mappa Nasrun dan Alwi, *Analisis Strategi Peningkatan PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*.

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/bbcb343707778e9dc94d743af2e8abcd.pdf>

Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

www.sipkdepkeu.go.id

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, www.djpkdepkeu.go.i

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

http://semarang.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/09/KAB_KLATEN_11_2014.pdf

Zulkifli & Haris Gunanto, “ *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah
Kabupaten Wonosobo*”, Kajian Bisnis, Vol 20, hal 210 – 229

STIE Widya Wiyaha
Jangan Plagiat